



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 951/III/III/2017 • MARET 2017



PAMERAN KERIS NASIONAL KOMITMEN DPR RI MAJUKAN SENI DAN BUDAYA

5 Pimpinan DPR RI Hadiri
Pertemuan dengan
Presiden Jokowi

22 DPR RI Desak
Pemerintah Keluarkan
Perpu untuk Freeport

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Pameran Keris Nasional Komitmen DPR RI Majukan Seni dan Budaya

Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan Pameran dan Bursa Keris Nasional, bertajuk "Pesona Keris Bali dan Lombok", di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, dari 15 hingga 17 Maret 2017.

Pembukaan Pameran Keris yang bersamaan dengan masa awal sidang DPR RI merupakan wujud nyata komitmen DPR RI dalam mengapresiasi dan memajukan seni dan budaya bangsa. Terutama dalam melestarikan Keris sebagai benda pusaka bangsa.

"Seperti kita ketahui, sejak tahun 2005, UNESCO telah mengakui Keris sebagai karya agung warisan kemanusiaan tak bendawi. Karena tak bendawi, keris penuh dengan nilai tak tampak seperti makna dan filosofi. Kita harus bangga, ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang luhur," kata Ketua DPR RI

Setya Novanto dalam sambutannya, di Gedung DPR RI,



Ketua DPR RI didampingi Pimpinan DPR RI lainnya saat membuka pameran keris di Gedung Nusantara DPR RI

Senayan, Rabu (15/03).

Dalam acara yang memamerkan koleksi sebanyak 105 keris dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat itu, hadir Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan. Hadir pula Anggota DPR RI, perwakilan Duta Besar negara sahabat, Raja-raja Nusantara, hingga penggiat keris dari berbagai wilayah Indonesia.

Melalui pameran ini, Novanto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mencintai seni dan budaya bangsa. Ia

menegaskan, jangan sampai karya seni dan budaya bangsa, seperti keris yang mempunyai nilai adiluhung, kemudian ditinggalkan.

"Jangan sampai kita justru mengadopsi budaya luar yang belum tentu sejalan dengan jiwa Bangsa Indonesia," imbuah politisi F-PG itu.

Novanto menjelaskan, pameran keris ini merupakan pameran kedua yang diselenggarakan DPR RI. Sebelumnya, DPR RI juga pernah menggelar pameran batu akik dari berbagai daerah, lukisan karya



Sejak tahun 2005, UNESCO telah mengakui Keris sebagai karya agung warisan kemanusiaan tak bendawi. Karena tak bendawi, keris penuh dengan nilai tak tampak seperti makna dan filosofi. Kita harus bangga, ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang luhur

para maestro lukis Indonesia, batik dari seluruh penjuru nusantara, dan berbagai pameran seni budaya lainnya.

"Kesenian dan kebudayaan adalah kekayaan sekaligus kebanggaan nasional. Kita harus cintai, jaga dan lestarikan," pesan politisi asal dapil NTT itu.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon. Menurutnya, dengan adanya pameran ini, merupakan usaha untuk mengembangkan dan melestarikan keris di Indonesia. Apalagi keris sudah diakui sebagai warisan agung budaya dunia atau *intangible heritage of humanity* oleh UNESCO pada tahun 2005.

"Hal ini juga sebagai komitmen terhadap pengakuan dari UNESCO itu, kita harus banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk pameran, *workshop*, edukasi, sehingga keris ini selalu terus berkembang," kata Fadli.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, saat ini semakin banyak orang yang mengoleksi keris, termasuk di luar negeri. Bahkan minat mengoleksi keris juga hadir di belahan Eropa

dan Amerika, termasuk saat ini yang sedang gencar adalah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

"Kita juga tidak ingin keris-keris pusaka 'lari' keluar. Lebih baik keris dimiliki kolektor dalam negeri. Keris-keris baru buatan Empu atau pengrajin keris saat ini sudah cukup bagus dan indah, tersebar di berbagai daerah, juga perlu kita kembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif," jelas Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun berharap kedepannya akan digelar pameran keris dari berbagai daerah lain di Tanah Air. Seperti dari Sulawesi dan Sumbawa, dan tahun mendatang dari Sumatera dan Jawa. Menurut Fadli, karena banyaknya koleksi dari seluruh wilayah Indonesia, maka pameran akan dibagi secara tematik.

"Supaya pameran ini lebih spesifik, karena keris-keris Nusantara ini kan sangat kaya. Jadi kita ingin membagi secara tematik dari berbagai kepulauan atau daerah yang memiliki tradisi keris," tutup Fadli, yang juga merupakan Ketua Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI).

Sebelumnya, Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk melaporkan, acara pameran dan bursa keris ini didukung sebanyak 200 peserta pameran dan bursa. Keris yang dipamerkan sebanyak 105 keris.

Sebelum pemotongan pita peresmian pameran keris, acara diwarnai dengan Tarian Manggala dari Sanggar Sangging Nusantara, pimpinan I Gede Ponce. Tari Manggala merupakan tari kepahlawanan yang bernuansa klasik, dan melukiskan persiapan sekelompok pasukan perang dari Kerajaan Badung (Bandana) sebelum maju ke medan perang. ■

(sc.sfi) / Foto: Andri/ftr



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI
Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah

ADMINISTRASI FOTO
Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: DPR RI.pemberitaan@gmail.com, www.DPR RI.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Wijaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

Penanggung Jawab Produksi
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

Staf Produksi
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

Penanggung Jawab Distribusi dan Sirkulasi
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

Koordinator
Mujiono

Staf Distribusi dan Sirkulasi
Arif, Lamin, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

DPR RI Harap Kerjasama Indonesia-Thailand Dapat Ditingkatkan

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan Ketua Parlemen Thailand Pornpetch Wichitcholchai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/03).

Kunjungan ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan baik dan meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Turut mendampingi Ketua DPR RI Setya Novanto, yakni Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Korekku Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, dan Ketua Banggar Azis Syamsuddin.

Novanto mengucapkan terima kasih kepada Ketua Parlemen Thailand atas kunjungan ini dan berharap kerjasama antara

kedua negara dapat ditingkatkan. "Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan Ketua Parlemen Thailand ini," ujar Novanto, mengawali Konferensi Pers dihadapan media.

Dalam kunjungan ini, Novanto berharap kerjasama kedua negara dapat ditingkatkan, termasuk di bidang pariwisata, infrastruktur dan argo industri. "Kerjasama ini perlu untuk ditingkatkan lagi khususnya di bidang infrastruktur, maritim, argo industri serta kerjasama di bidang pariwisata perlu ditingkatkan tidak hanya di Bali tapi juga di daerah lain," jelas Novanto.

Selain itu, Politisi Golkar ini juga mengapresiasi Thailand yang menempati rangking 11 soal investasi di Indonesia dengan total investasi mencapai 87 proyek.

"Thailand menempati rangking 11 sebagai investor terbesar dengan investasi US\$ 174.17 juta dengan 87 proyek," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Parlemen Thailand sangat



mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi dalam *Joint Meeting* di Thailand yang akan diselenggarakan pada April 2017. Kehadiran Presiden diharapkan akan menambah hubungan baik kedua negara. "Thailand sangat mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi di Thailand dalam *joint meeting* baik dalam politik ekonomi dan investasi dan juga hubungan internasional lain yang akan dilaksanakan April," terangnya.

Lebih lanjut Novanto menginformasikan bahwa Parlemen Thailand ingin menjadi Anggota GOPAC yang diketuai Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon. Ia pun berharap dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan GOPAC. "Tadi disampaikan karena Pak Fadli Zon selaku Ketua GOPAC, Thailand ingin menjadi anggota GOPAC dalam kerjasama tersebut. Dan akan menghadiri acara yang berkait dengan masalah hubungan kedua negara," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Parlemen Thailand Pornpetch Wichitcholchai juga apresiasi atas pertemuan ini dan dirinya berharap akan memberikan manfaat bagi hubungan baik kedua negara. "Kedatangan kami disini untuk perkuat kedua parlemen Indonesia dan Thailand. Saya berharap kunjungan ini bermanfaat bagi parlemen kedua negara," pungkash Pornpetch. ■



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima kunjungan Ketua Parlemen Thailand

Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara Bahas Perekonomian Nasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta seluruh pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/03).

“ Kami membahas situasi sosial, ekonomi, politik dan berbagai isu terkini. Terutama mengenai perekonomian nasional dan mengurangi kesenjangan sosial. Presiden Jokowi meminta masukan dan berdialog dengan para pimpinan lembaga negara yang hadir,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto, usai pertemuan yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Novanto menilai, saat ini pemerintah cukup realistis dalam mengelola roda perekonomian. Dirinya pun optimis target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di atas 5 persen bisa terealisasi. Dengan kondisi stabilitas politik dan keamanan yang semakin membaik, Novanto pun yakin pemerintah dapat menjaga iklim investasi dan memperluas pusat perekonomian di berbagai daerah.

"Saya mendukung pertumbuhan ekonomi yang memiliki dimensi keadilan, sehingga bisa sejalan dengan pemerataan pembangunan," harap politisi Fraksi Partai

Golkar itu.

Novanto mengakui usaha tersebut memang tak mudah. Mengingat situasi perekonomian global yang tidak pasti. Menurutnya, upaya konkrit pemerintah untuk mengatasi persoalan kesenjangan juga bisa dilakukan dengan meningkatkan akses dan alokasi kredit bagi usaha rakyat (UMKM).

Selain itu, tambah Novanto, pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini diberikan pemerintah sudah baik. Terutama dengan tingkat bunga KUR dibawah tingkat bunga pasar. Ini bisa menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

"Saya mengapresiasi pertemuan ini. Komunikasi dan kerjasama yang baik perlu dilakukan antar lembaga negara. Ini menunjukkan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara. Insy Allah, pertemuan seperti ini rutin dilakukan secara berkala," harap politisi asal dapil NTT itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memaparkan peningkatan pertumbuhan

ekonomi Indonesia, yang pada 2016 lalu telah mencapai 5,05 persen.

"Pertumbuhan ekonomi kita pada 2016 alhamdulillah mencapai 5,05 persen. Ini patut disyukuri karena pada 2015 lalu hanya mencapai 4,88 persen," jelas Presiden. Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, namun menurut Presiden, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Hadir pula dalam pertemuan ini, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didampingi empat wakilnya, yakni Oesman Sapta Odang, Hidayat Nurwahid, Mahyudin dan E.E Mangindaan. Kemudian Ketua DPD RI Mohammad Saleh didampingi wakilnya, yakni Farouk Muhammad dan G.K.R Hemas. Dan hadir pula pimpinan lembaga tinggi negara lainnya dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. ■

(sf) / foto:andri/hr



Pimpinan DPR RI hadir pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara

Taufik Kurniawan Nilai Hak Angket e-KTP Kurang Tepat

Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan menilai hak angket terkait e-KTP dinilai kurang tepat. Ia memahami bahwa hak angket ini suatu hak eksklusif DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan

Hal tersebut diungkapkannya usai mendampingi Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Thailand Pornpetch Wichitcholchai, Rabu (15/03).

"Hak angket itu tujuannya adalah hak eksklusif yang dimiliki DPR RI terhadap hal konstitusional untuk fungsi pengawasan pada pemerintah. Jadi arahnya adalah pemerintah," ujar Taufik.

Meskipun begitu, Politisi PAN ini pun berpandangan bahwa hak angket untuk KPK ini dirasa kurang tepat. "Kalau hak angket untuk KPK menurut saya kurang tepat. Menurut saya ya. Tapi kan ya namanya politik," ujar Taufik.

Ia mempertanyakan tujuan hak angket tersebut untuk ditujukan kepada siapa, mengingat KPK adalah lembaga independen yang dibentuk dan dipimpinnya dipilih berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

"Dalam kacamata objektif itu hak angket guna kritisi pemerintah secara konstitusional. Nah kalau KPK kan sebuah lembaga yang dibuat DPR RI sendiri. Nah kalau diangketkan maka ditunjukkan kepada siapa," tutur Taufik.

Sebelumnya diberitakan bahwa beberapa pihak di DPR RI mengusulkan untuk mengajukan hak angket terkait kasus e-KTP. Namun, hal tersebut kini masih dalam perdebatan di internal DPR RI. ■

(hs/sc) / Foto Iwan Amnias/hr

DPR RI Berharap Dubes Perluas Perdagangan Indonesia di Dunia Internasional

Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi dan memberikan selamat kepada 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia yang akan ditempatkan di berbagai negara sahabat. Pelantikan 17 Duta Besar tersebut dilaksanakan pada, Senin (13/03) oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

“ Saya mengapresiasi dan memberikan selamat kepada para Duta Besar yang baru saja dilantik. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, ada dari ilmuwan, aktifis, purnawirawan, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang yang telah dimiliki, saya yakin para Duta Besar yang baru saja dilantik bisa menjalankan misi kenegaraan dengan baik, sesuai dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri yang telah digariskan oleh Presiden Jokowi,” papar

Setya Novanto usai pelantikan tersebut.

Ia berharap, selain menjalankan misi diplomatik menjaga hubungan baik dengan negara sahabat, para duta besar juga bisa melakukan hal lain yang bermanfaat bagi Indonesia.

"Para duta besar dapat membuka dan memperluas pasar perdagangan Indonesia di dunia internasional. Perwakilan Indonesia di berbagai negara sahabat bisa menjadi jendela pemasaran yang efektif. Seiring dengan iklim ekonomi dalam negeri



Ketua DPR RI Setya Novanto

Selain menjalankan misi diplomatik menjaga hubungan baik dengan negara sahabat, para duta besar juga bisa melakukan hal lain yang bermanfaat bagi Indonesia.

yang terus membaik, para Duta Besar juga bisa menarik investasi ke dalam negeri. Tak kalah penting, potensi pariwisata Indonesia juga harus dipromosikan secara maksimal", jelas politisi dari Partai Golkar.

Lebih lanjut, ia menyatakan, bahwa peningkatan potensi kerjasama di berbagai bidang juga perlu diperhatikan. "Selain kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan, para duta besar juga bisa meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, terutama memperluas beasiswa pendidikan yang dapat diakses oleh saudara-saudara kita di dalam negeri", tandasnya.

"Dengan peran aktif para duta besar kita di berbagai negara, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang disegani dan dihormati", jelas anggota dewan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur ini. ■

(sc)/foto:andri/hr

Isu Wahabisme Sudah Tidak Relevan Di Indonesia

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menilai isu wahabisme sudah tidak menjadi persoalan dalam konteks menjalin hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi. Menurutnya isu wahabi hanya sebuah *blame* terhadap ekstrimitas yang didorong secara liar. Padahal Indonesia sudah bersentuhan langsung dengan berbagai pemikiran sejak lama.

“ Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pendiri bangsa yang mengenyam pendidikan di Mekkah. Hal itu diungkapkan saat ditemui di Ruang Kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/03).

"Tak ada perbedaan, orang hanya mempertajam persoalan. *Blame* terhadap ekstrimitas itu di dorong secara liar. Padahal Indonesia sudah bergumul dengan berbagai macam pemikiran, termasuk Wahabi. Pemimpin pergerakan nasional dan Islam rata-rata alumni Mekkah. KH Hasyim Asyari pendiri NU dan KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah misalnya itu alumni Mekkah," jelas Fahri.

Dengan latar belakang pendiri bangsa yang lama mengenyam pendidikan di Arab Saudi sehingga membuat Isu Wahabisme menjadi hal yang biasa untuk dipelajari secara

akademis dalam konteks aliran pemikiran keagamaan. Ketika mereka kembali ke Indonesia maka semangat persatuan yang disolidkan dalam rangka kepentingan nasional.

"Disitu mereka belajar Pan-Islamisme. Belajar tentang Wahabisme dan pemikiran keagamaan yang lain. Ketika mereka datang ke Indonesia ini menjadi sesuatu yang disolidkan sebagai kepentingan nasional dan lahiran Pancasila," jelas Fahri.

Sehingga isu wahabisme bukan menjadi momok untuk dijadikan sebab untuk berkonflik dengan Arab Saudi, karena para pendiri bangsa Indonesia sudah melampaui pemahaman tersebut. "Nah sekarang ada orang yang menakut-nakuti dengan isu wahabi. Padahal itu sudah dilampaui oleh kita. Kita tak lagi menganggap sebagai sesuatu yang ekstrim," tuturnya.

"Kita memikirkannya sebagai suatu pandangan pemikiran yang positif dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjadikan ini sebagai momok bahkan menjadi sebab kita untuk berkonflik," sambung Fahri Hamzah.

Politisi PKS ini pun mendorong agar Indonesia tetap terus menjalin kerjasama dengan Arab Saudi. Hal itu sudah tertuang dalam MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Ia pun mengedukasi untuk tidak terpengaruh terhadap isu yang menjauhkan hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi, salah satunya melalui isu Wahabisme. ■

(hs/sc) / Foto :runi/hr



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah



Ketua DPR RI Setya Novanto

DPR RI Bangga Atas Kemenangan Marcus dan Kevin di All England 2017

Indonesia mendapatkan kabar membanggakan dari pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, yang telah berhasil menjadi juara Ganda Putra dalam ajang kejuaraan bulutangkis bergengsi, All England 2017.

Dalam kejuaraan yang diselenggarakan di Barclaycard Arena, Birmingham, Inggris, Marcus/Kevin mengalahkan pasangan Tiongkok, Li Junhui/Liu Yuchen, dengan skor 21-19 dan 21-14.

"Saya bangga, bendera merah putih bisa dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa dikumandangkan dalam ajang All England 2017. Semua ini berkat tetesan keringat dan semangat pantang menyerah Marcus/Kevin yang berhasil mengalahkan pasangan ganda putra China," kata Ketua DPR RI Setya Novanto, kepada Parleментарia, Senin (13/3).

Politisi F-PG itu menambahkan, prestasi membanggakan yang diperoleh pasangan Marcus/Kevin, merupakan kehormatan milik Bangsa Indonesia. Perjuangan Marcus/Kevin, serta para atlet bulutangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa harus kita jadikan semangat memupuk kembali jiwa nasionalisme.



Juara Ganda Putra All England 2017

Saya bangga, bendera merah putih bisa dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa dikumandangkan dalam ajang All England 2017

"Sebagai bangsa yang besar, jangan sampai kita terpecah belah. Justru kita harus bahu membahu dan saling mendukung memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi, seperti halnya yang ditunjukkan oleh Marcus/Kevin," imbuh Novanto.

Menurut politisi asal dapil NTT itu, bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang populer di masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dengan aneka suku bangsa dan agama, olahraga telah menjadi alat penyatu seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Dalam olahraga, kita menjunjung tinggi sportivitas. Siapapun bisa berjuang dan memberikan yang terbaik bagi Tanah Air, tanpa memandang suku maupun agama. Terimakasih Marcus/Kevin, serta seluruh atlet dan official team Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah dalam ajang All England 2017. Semangat kalian adalah kebanggaan Bangsa Indonesia," tutup Novanto. ■

(st) foto: andri/hr.



DPR RI Berkomitmen Percepat Pembahasan RUU Prioritas Tahun 2017

Pimpinan DPR RI menghimbau kepada Komisi-komisi, Badan dan Pansus serta anggota DPR RI agar tetap memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi. Terutama yang sudah melebihi 3 kali Masa Persidangan dengan tetap memperhatikan kualitasnya.



Ketua DPR RI Setya Novanto ketika menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2016 - 2017

Demikian penegasan Ketua DPR RI Setya Novanto ketika menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun Sidang 2016-2017 di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (15/3).

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Taufik Kurniawan, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah, Setya Novanto menekankan, walaupun masa persidangan ini relatif singkat, DPR RI berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan RUU yang menjadi prioritas tahun 2017.

Beberapa RUU yang diharapkan bisa diselesaikan pada masa sidang ini menurut

Setnov ada 10 RUU, yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, RUU Perubahan Kedua atas UU No.17/2014 tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD (MD 3), RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU tentang Perubahan atas UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU Arsitek, RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), RUU Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan.

Ketua DPR RI juga menjelaskan, beberapa RUU yang sedang dalam tahap

penyusunan pada tahun 2017 ini adalah RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, RUU Perubahan atas UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU Sistem Budi Daya Tanaman dan RUU Sumber Daya Air.

Sedangkan 4 RUU yang akan diselesaikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan yaitu RUU Perubahan atas UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU Perkelapasawitan, RUU Perubahan atas UU Np.32/2002 tentang Penyiaran dan RUU Perubahan atas UU N0.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. ■

(mp) / Foto: Jakarta/hr

DPR RI Segera Uji Kelayakan Sejumlah Pejabat Publik

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada masa sidang yang dimulai Rabu (15/3) ini, DPR RI akan melakukan serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah pejabat publik.

Ketua DPR RI Setya Novanto saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2016/2017, menyatakan sejumlah pejabat publik itu adalah calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu, calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI, calon anggota KPU dan Bawaslu serta calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Terhadap Tim-tim Pengawas, Pimpinan Dewan mengharapkan agar



Ketua DPR RI Setya Novanto

tertetap melakukan kegiatan pengawasan. Khusus kepada Timwas terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang telah melakukan kunjungan Diplomasi ke Parlemen Hongkong, Ketua DPR RI minta segera

mengimplementasikan hasil kunjungannya untuk perbaikan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri.

Sedangkan kepada Tim Implementasi Reformasi DPR RI, Setnov berharap segera menyelesaikan *blue print* kerangka implementasi reformasi DPR RI untuk menuju Parlemen Modern. Dalam peran diplomasi parlemen, DPR

RI akan mengagendakan dan mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang organisasi parlemen regional.

Diantaranya, Pertemuan Komisi Tetap Parlemen Asia tentang masalah-masalah politik dan Komisi Khusus Pembentukan Parlemen Asia di Islamabad, Pakistan, Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Internasional tanggal 20 Maret, Pertemuan

ke-136 Sidang Persatuan Parlemen Internasional (IPU) di Manama, Bahrain dan Pertemuan Asosiasi Parlemen Asia Tenggara (AIPA) pada pertemuan Tingkat Tinggi ke-30 ASEAN tanggal 30 April 2017 di Manila, Philipina. ■

(mp) Foto: Andri/hr

BKD RI Diharap Bisa Beri Formulasi Solutif untuk Polemik *Freeport*

Silang pendapat antara Pemerintah RI dengan Freeport masih terus bergulir, pemerintah berprinsip pada semangat kedaulatan negara atas perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI. Merespon polemik tersebut Badan Keahlian Dewan (BKD) RI menyelenggarakan *workshop* bertema 'Freeport Quo Vadis' di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/03).

A cara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dia berharap diskusi ini bisa memberikan perspektif yang segar dan konstruktif guna mendukung fungsi legislasi DPR RI. Dia mengatakan, "Masalah pokoknya adalah belum ada titik temu, terkait kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan ketentuan besaran divestasi," ungkap Fadli.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan seminar ini dilakukan untuk menemukukan formulasi solutif, guna berkontribusi mengatasi permasalahan Freeport dalam rangka mendukung fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI. Dari diskusi



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon saat workshop BKD bertema "Freeport Quo Vadis"

ini masukannya akan diberikan kepada komisi-komisi terkait untuk mengambil sikap pada pemerintah.

Adapun yang menjadi perdebatan antara pemerintah dengan Freeport adalah,

pemerintah berpegang pada sikap yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau yang sering disebut Undang-Undang Minerba. Dan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, PP Nomer 1 Tahun 2017.

Sementara Freeport mengambil posisi tidak sejalan dengan yang dikehendaki pemerintah, dengan mendasarkan kontrak karya yang telah disepakati pada tahun 1991 dan akan berakhir pada tahun 2021. Freeport bahkan mengancam akan membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Internasional, terkait peralihan status izin kontrak karya ke izin pertambangan khusus.

Seminar ini menghadirkan para ahli dan tokoh-tokoh intelektual, diantaranya Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, dan Konsultan Hukum Chandra Yusuf. ■

(eko/sc)/foto:jayadi/hr

Hak Angket Belum Perlu Untuk Penanganan Kasus e-KTP

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai penggunaan hak penyelidikan atau angket terhadap penanganan kasus korupsi e-KTP belum perlu dilakukan. Demikian diungkapkannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/03).

“ Saya rasa hak angket tidak perlu, masih banyak instrumen lain untuk mempertanyakan penyelidikan KPK, bukan melalui hak angket saja, ” ujarnya kepada Wartawan.

Menurutnya, masih ada cara lain yang bisa dipakai untuk menanyakan penyelidikan

dan penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Diantaranya, melalui rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan KPK serta hak mengajukan pertanyaan.

"Dalam raker itu, bisa dikritisi soal penyebutan nama anggota dewan yang disebut menerima aliran dana. Tapi, bukan berarti kalau ditanyakan ini intervensi yah," kata politisi dari F-PPP itu.

Disisi lain, lanjutnya, penanganan kasus e-KTP oleh KPK memang perlu dikritisi. Sebab, KPK telah menyebutkan sejumlah nama yang terduga menerima aliran dana.

Menurutnya, KPK harus membuktikan apa yang disebutkannya dalam surat dakwaan persidangan. Jika hal itu tidak terbukti, lanjutnya, maka bukan penegakkan hukum melainkan penistaan hukum terhadap orang-orang tertentu.

"Semua orang yang didetaikan dalam dakwaan harus dibuktikan, kalau tidak terbukti berarti melakukan



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

pencemaran nama baik. Ini yang saya kira, harus dikritisi juga, KPK terkadang begitu bersemangat dalam dakwaannya menyebutkan nama dan status bersama-sama tetapi tidak jelas tindak lanjutnya, seperti kasus Bank Century," tandasnya. ■

(amm/sa) / Foto : Kresno/hr



Gedung KPK

BPK dan BPKP DIY Dorong Pemda Implementasikan SAP Berbasis Akrual



Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Dewan (BKD) Helmizar mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis Akrual.

Kepala PKAKN dan tim saat kunjungi BPK Provinsi Yogyakarta dan BPKP



“ BPK RI dan BPKP perwakilan DIY telah melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu berupaya agar Pemda siap melaksanakan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual,” katanya, saat memimpin Tim Studi Lapangan dan Analisis Pelaksanaan serta Penerapan SAP berbasis Akrual di Kantor BPK perwakilan DIY, Jum'at (10/03).

Helmizar, menyampaikan pertemuan ini untuk meminta data dan informasi mengenai SAP berbasis akrual yang sudah dilakukan oleh Kabupaten dan Kota yang ada di DIY. Hal ini untuk memantau pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pasal 10 ayat (2) mengamanatkan, penerapan SAP berbasis akrual pada pemda paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

"Setiap pemda dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemda dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual," paparnya.

Kepala BPK RI Perwakilan DIY Yusnadewi menjelaskan, instansinya telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemda dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, pada semester II Tahun 2015. Pemeriksaan dilakukan tematik, artinya seluruh Indonesia dilakukan pemeriksaan.

"Hampir seluruh perwakilan pada semester II itu melakukan pemeriksaan kinerja untuk akrual ini. Dan rata-rata setiap perwakilan itu punya 3 entitas yang kita *sample*. Kalau Yogyakarta ada 4 entitas, Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman," ungkapnya.

Yusnadewi menemukan masalah yang masih terjadi adalah komitmen regulasi

dan kebijakannya sebagai upaya pemda dalam melaksanakan implementasi SAP berbasis Akrual dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji.

Karena itu diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

Dalam rangkaian studi lapangan ini, PKAKN BKD ini juga berkunjung ke BPKP perwakilan DIY, untuk lebih mendalami peran badan pengawas ini melaksanakan supervisi dalam melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap akuntabilitas dan tata kelola di Pemerintah Daerah. Helmizar menegaskan hasil dari informasi dan data yang didapatkan akan dilakukan kajian ulang, kemudian disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.

Fauzi A. Kharir sebagai Koordinasi Pengawas bidang Akuntabilitas Pembangunan Daerah menyampaikan BPKP Perwakilan DIY mempunyai mitra di seluruh Pemda DIY dan 6 kabupaten dan kota di Jawa tengah (Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen).

Pada Wilayah kerjanya, yang belum WTP menurut hasil pemeriksaan BPK ada 3 Pemda yaitu Kota dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Cilacap. Selain itu, pengelolaan keuangan yang menggunakan aplikasi SIMDA yang disiapkan BPKP yaitu Bantul dan Kulonprogo, dan seluruh wilayah mitra di Jawa tengah, dan Sleman baru tahun depan telah meminta SIMDA BPKP.

"Selain dengan SIMDA, BPKP juga melakukan pendampingan terhadap infrastruktur-infrastruktur pendukungnya seperti peraturan Bupati, sistem kepala daerah terkait kebijakan akuntansi. Kita hanya memfasilitasi saja tanpa bisa memaksa terkait kebijakan," katanya. ■

(as), foto : agung s/hr.

Rusaknya Terumbu Karang Raja Ampat oleh Kapal Asing Sakiti Hati Bangsa

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhie Prabowo menilai rusaknya terumbu karang di Raja Ampat karena kapal asing secara moral menyakiti hati bangsa ini. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum memasuki ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Rabu (15/03).

“ Secara moral peristiwa itu jelas menyakiti bangsa ini. Bagaimana tidak, terumbu karang di Raja Ampat menjadi salah satu daya Tarik wisata daerah tersebut yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat. Dirusak begitu saja akibat karamnya kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky. Butuh waktu yang lama untuk memperbaiki semua itu,” ungkap Edhie.

Lebih lanjut Edhie mengatakan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap biota laut. Pihaknya

akan mendesak pemerintah melalui mitra kerjanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengusut tuntas dan menindak tegas, bahkan meminta ganti rugi terhadap perusahaan pemilik kapal tersebut.

“Kalau ada nelayan Indonesia yang merusak terumbu karang saja ditangkap, apalagi ini, kapal besar milik asing yang jelas-jelas kerusakannya sangat besar dan parah. Kami, di Komisi IV DPR RI ke depan akan mempertanyakan pengawasan yang dilakukan KKP terhadap laut Indonesia



Ketua Komisi IV DPR RI, Edhie Prabowo

termasuk biota laut di dalamnya. Sedangkan terkait kawasan perhubungan laut itu menjadi domain Kementerian Perhubungan dan Angkatan Laut. Disini saya mendesak semua tersebut harus duduk bersama menindak tegas kasus ini, dan melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” pungkas politisi Fraksi Partai Gerinda. ■

(Ayu) Foto: Kresno/hr

Rusaknya Terumbu Karang Dewan Dorong Pemerintah Lakukan Tindakan Hukum



Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo

Terkait kerusakan terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat oleh Kapal Pesiar MV Caledonian Sky, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk melakukan penindakan hukum akibat insiden yang terjadi pada Sabtu, 4 Maret 2017 lalu.

“ Kita harus tetap menegakkan aturan hukum kita, karena terumbu karang merupakan salah satu yang dilindungi. Oleh karena itu, harus dikenakan sanksi pelanggaran berat supaya kapal-kapal asing tidak menyepelkan hal seperti ini,” tegas Firman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/03).

Lebih lanjut, politisi dari F-Golkar itu menuturkan insiden kapal perusak terumbu karang itu merupakan salah satu



bentuk pelecehan terhadap kedaulatan negara. Sebab, disinyalir ada aturan hukum yang dilanggar MV Caledonian Sky.

"Didalam regulasi, jelas disebutkan jenis-jenis kapal dengan kedalaman tertentu, ternyata terumbu karang yang rusak itu berada di kedalaman 5 meter, artinya ini pelanggaran," kritisinya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V Syarif Abdullah Alkadrie, ia sangat menyangkan hal seperti itu bisa terjadi. Menurutnya, setiap kapal asing yang masuk ke wilayah zona dangkal harus dipandu, terutama di daerah perairan laut wisata bahari. "Yang jelas kapal itu harus ada pemandu, ini yang akan kita tanyakan

kepada perhubungan," ungkapnya.

Di sisi lain, politisi dari F-Nasdem itu juga mendorong untuk segera dibuatnya regulasi yang mengatur lalu lintas kapal di tempat-tempat tertentu, khususnya di kawasan konservasi perairan sehingga hal serupa tidak terjadi lagi di perairan Indonesia.

"Regulasi belum mencakup itu, ini pembelajaran bagi kita untuk mengatur lebih detail, supaya ada pemetaan jalur berlayar. Mengingat, banyak laut-laut kita yang berpotensi menarik wisatawan, seperti di Bunaken, itu daerah wisata juga, jangan sampai suatu waktu ada kapal lain yang datang menubruk terumbu karang,"

jelas Syarif.

Sebagaimana diketahui, Kapal Pesiar berbendera Bahama sepanjang 90 meter milik operator Noble Caledonia kandas di sekitar Pulau Kri, Kabupaten Raja Ampat. Kapal yang mengangkut 79 orang kru kapal dan 102 penumpang itu hendak bertolak ke Bitung, setelah mengelilingi Pulau Waigeo untuk mengamati keanekaragaman burung.

Namun di tengah perjalanan, MV Caledonian Sky terjebak di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 5 meter. Akibatnya, seluas 13.533 meter persegi karang rusak di lokasi penyelaman (dive site) atau yang dikenal *Crossover Reef*. ■

(ann/so) Foto : Kresno/hr

Legislator Berharap Kerusakan Terumbu Karang Tidak Terjadi Lagi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyesalkan kerusakan terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang diakibatkan oleh kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky. Akibatnya, seluas 13.533 meter persegi karang di lokasi penyelaman (dive site) mengalami kerusakan. Sutan berharap, kejadian ini tidak terulang lagi.

“Kondisi yang terjadi di Papua Barat ini, sangat kami sayangkan. Kami mohon segera dilakukan terutama perbaikan. Kemudian, jangan sampai masalah ini terulang lagi. Harus ada antisipasi,” kata Sutan, sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Bentuk antisipasi itu, tambah Sutan, salah satunya melalui koordinasi yang baik, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten dan Kota. Hal itu juga sebagai bentuk antisipasi agar tidak ada pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia, harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang berlaku.

"Dari kejadian ini, berarti ada sesuatu regulasi yang belum diterapkan dengan koordinasi yang baik. Kami meminta kepada kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pariwisata agar segera melakukan langkah koordinasi kepada semua pihak, agar kerusakan potensi pariwisata ini tidak rusak lagi," tegas Sutan.

Politisi F-Gerindra ini khawatir, kerusakan terumbu karang ini dapat mempengaruhi *image* pariwisata Indonesia, apalagi

Pemerintah sudah cukup gencar mempromosikan pariwisata Tanah Air.

Sutan menambahkan, Pemerintah yang akan menuntut perusahaan untuk membayar ganti rugi, harus dikaji dari semua sisi. Menurutnya, harus dilihat apakah kapal pesiar mendapatkan izin untuk memasuki wilayah tersebut, atau wilayah itu seharusnya tidak boleh dilewati oleh kapal pesiar.

"Kalau memang ada larangan memasuki wilayah tersebut, namun tetap dilakukan oleh kapal, kami tegaskan perusahaan wajib untuk melakukan penggantian ataupun perbaikan. Bila perlu harus ditindak secara hukum. Karena kapal memasuki zona terlarang," tegas Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu pun memastikan akan segera menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, dengan salah satu agenda terkait kerusakan terumbu karang yang terjadi di Papua Barat ini.

Sebagaimana diketahui, kapal pesiar MV Caledonian Sky sepanjang 90 meter milik operator Noble Caledonia kandas di sekitar Pulau Kri, Kabupaten Raja Ampat. Kapal yang mengangkut 79 orang kru kapal dan 102 penumpang itu terjebak di perairan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

dangkal dengan kedalaman sekitar 5 meter. Akibatnya, seluas 13.533 meter persegi karang rusak di lokasi penyelaman (dive site) atau yang dikenal *Crossover Reef* di Raja Ampat. ■

(sf) foto: Kresno/hr

Prostitusi *Online* Anak Cermin Buruk Perlindungan Anak

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan, kejahatan prostitusi anak di bawah umur sudah pada tingkat kejahatan luar biasa dan mengkhawatirkan. Prostitusi anak di bawah umur ini makin marak bahkan sudah menggunakan teknologi informasi *facebook*, *twitter*, atau *media social* lainnya. Ini merupakan cermin buruknya perlindungan anak di tanah air.

“Luar biasa biadabnya, luar biasa jahatnya, luar biasa buruknya bagi perlindungan anak di tanah air kita ini. Kasihan saya begitu mendengar ini, tidak kuat lagi saya,” katanya kepada Perleментарia, sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (15/3).

Menurut Ali Taher, hal ini disebabkan dampak negatif dari media sosial dan media telekomunikasi memang tidak bisa dihindarkan. Pasalnya regulasi kita belum mampu untuk menekan laju informasi yang sangat terbuka.

Masyarakat yang dinilai sangat permisif (*longgar*) soal etika, dan dengan persoalan-persoalan kriminalitas yang dianggap hal biasa, sehingga tingkat pengawasan menjadi lemah. Rumah tangga yang rapuh, kontrol sosial yang kurang mampu memberikan warna dalam kehidupan sosial, hingga masyarakat sekarang sangat individu, materialis, komersialisme, dan sekuler, menjadikan ada kegamangan sosial.

Sebagai Wakil Rakyat yang diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, Politisi Partai Amanat Nasional ini mengutarakan perlunya memperkuat regulasi untuk menekan tingkat kejahatan terhadap anak.

"Saya kira regulasi harus diperketat, mempertajam, memperkuat dan regulasi agar mampu menahan laju tingkat kriminalitas terhadap kejahatan termasuk kejahatan kepada anak. Regulasi itu saya kira harus memberikan hukuman pidana



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher

yang lebih," katanya.

Ali Taher mengungkapkan sudah ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Itu saja kalau diterapkan sudah dapat menjawab keresahan terhadap kejahatan terhadap anak, namun itu semua tergantung pada posisi hakim atau penegak hukumnya.

"Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 saja paling tidak bisa menjawab persoalan-persoalan kegamangan sosial tadi, misalnya ada hukuman mati, hukuman kebiri,

hukuman maksimal, dan hukuman pengumuman identitas," paparnya.

Di sisi lain, dia melihat meskipun regulasi undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang merupakan suatu bagian dari Perpu Nomor 1 tahun 2016 ini sudah diundangkan, namun peraturan pelaksanaannya masih lemah. "Kita masih menunggu Peraturan Pemerintah, ukuran teknisnya itu yang perlu segera," tukasnya.

"Yang masih lemah itu regulasi tingkat implementasi teknisnya. Ini yang perlu dilakukan oleh Kementerian terkait segera melakukan upaya-upaya supaya negara mengeluarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri serta teknisnya, supaya aparat hukum bisa mempunyai pegangan untuk bisa memberikan hukuman yang sangat maksimal kalau perlu hukuman mati bagi tingkat kejahatan yang sangat

Rumah tangga yang rapuh, kontrol sosial yang kurang mampu memberikan warna dalam kehidupan sosial, hingga masyarakat sekarang sangat individu, materialis, komersialisme, dan sekuler, menjadikan ada kegamangan sosial.

luar biasa ini," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Komisi yang membidangi Agama dan perlindungan anak, akan memanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Komnas Perlindungan Anak, guna meningkatkan perlindungan terhadap anak serta mencegah terjadi prostitusi *online* anak di bawah umur.

"Komik VIII DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian PPPA Kementerian Sosial dan kepolisian supaya anak-anak korban kejahatan ada upaya rehabilitasi. Kemudian proteksinya perlindungan dan pengawasan terhadap anak perlu ditingkatkan," tambahnya.

Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa kejahatan seksual anak di bawah umur ini seperti gunung es yang sudah lama terjadi. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya menutup situs-situs porno, dan situs-situs lainnya yang diduga melibatkan para pihak dalam melakukan tindak kejahatan kriminal terhadap anak.

"Oleh karena itu menurut saya pemerintah dalam hal ini kepolisian maupun Kementerian Kominfo segera menutup situs-situs pornografi dan pornoaksi," tegasnya. ■

(as) / Foto: Kresno/hr



<https://www.theodysseyonline.com>

KPK Tidak Masuk ke Daerah Jika Fungsi Hukum Berjalan Baik

Munculnya wacana KPK membuka cabang di Provinsi tidak diperlukan jika Kepolisian dan Kejaksaan bekerja dengan baik. Pasalnya, ada beberapa kasus yang ditangani lembaga penegak hukum mandek.

“ Saya ambil contoh di daerah Maluku Utara, ada seorang mantan bupati yang sakti betul, kasusnya sudah 5-10 tahun tidak pernah diangkat padahal kasusnya sudah jelas,” kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat pertemuan dengan Kejati dalam rangkaian acara Kunker di Bali, Kamis (9/3).

Kemudian, sambung Bamsoet-panggilan akrab Ketua Komisi III DPR RI ini, ada pengaduan dari masyarakat yang melapor ke KPK, berselang tidak lama langsung ada rencana KPK untuk mengusut kasus itu, namun Kajati dan Kepolisian meminta agar mereka saja yang menangani.

"Nah, kalau kerja kepolisian dan kejati di daerah sudah baik, KPK mungkin tidak akan banyak ke daerah lagi. Sehingga tidak ada lagi wacana KPK ingin membangun cabang di daerah," terang Politisi F-Golkar itu.

Jadi, lanjut Bamsoet, jika ada orang tersangka korupsi yang ditangkap KPK di suatu daerah, maka itulah kegagalan Kajati dan Kajari. Karena mana mungkin KPK bisa tahu kasus yang ada di daerah kalau bukan ada yang melapor.

Selain itu, menurut Bambang, memang ada wacana bahwa Kejaksaan ini tugasnya hanya penuntutan, tidak boleh lagi melakukan penyelidikan apalagi penyidikan. Jadi ada semacam pemisahan kekuasaan atau wewenang dari kejaksaan.

"Makanya kita berharap kejaksaan bisa menjaga dirinya sendiri, agar kekuasaannya tidak diambil oleh pihak-pihak lain. Tunjukkan kepada kami bahwa kejaksaan masih sangat diharapkan kinerjanya," harapnya.



Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo

Sementara itu, Kajati Bali, Jaya Kesuma, mengatakan, "kami akan selalu berusaha maksimal dalam bekerja dalam penegakan hukum, dan mohon doanya agar kami dalam setiap perkara kasus tidak ikut terseret dalam ranah politik," ungkapnya.

Ia mencontohkan, dalam kasus Margriet sudah ditangani secara profesional. Memang ada pandangan yang bersangkutan seolah-olah terzalimi.

"Dalam kasus ini, kami sudah melakukan sesuai prosedur, mulai diuji tingkat pertama sampai kasasi. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ada rekayasa dari penyidik, berarti kami ikut mengamankan. Publik juga bisa menilai fakta di persidangan terbuka, jika memang ada tuduhan rekayasa," jelasnya.

Jaya juga menuturkan, bahwa, Kejati masih mampu untuk menangani permasalahan-permasalahan kasus hukum di daerah, "Saya rasa tidak perlu KPK membuka cabang di daerah, biarlah menjadi kewenangan Kejati," tutupnya. ■

(ik-mp) Foto: Jaka/hr

Pengawasan Lapas Lemah DPR RI Evaluasi Kinerja BNNP Bali

Lemahnya pengawasan di Lapas Kerobokan Bali mengakibatkan peredaran narkoba masih ditemukan di dalam lapas. Sudah menjadi pengetahuan umum, Lapas Kerobokan ini merupakan 1 dari 39 tempat sumber bisnis narkoba di Indonesia dan menjadi salah satu dari 72 jaringan internasional.

“Ketika kami meninjau Lapas Kerobokan, sebenarnya areanya tidak terlalu luas, tapi kenapa kecolongan dan kebobolan terus. Kami akui memang rasionya tidak masuk akal, sekitar 1.800 tahanan hanya diawasi sekitar 30 petugas dan kapasitasnya hanya 300 sel atau kamar, ini menjadi persoalan pelik juga,” kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat rapat dengan Kapolda dan Kepala BNNP Bali dalam rangkaian acara Kunker di Bali, Jum'at (10/3).

Kemudian, sambung Bamsoet-panggilan akrab Ketua Komisi III DPR RI ini, ia menyarankan agar Kepala BNNP dan Polda Bali berkoordinasi dgn Kemenkumham untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi agar peredaran narkoba tidak lebih meluas.

"Kepala BNNP Bali fokus saja dengan pencegahan narkoba di lapas, jika kami masih mendengar lagi ada bandar-bandar dalam lapas, selain kegagalan Kumham berarti ini juga menjadi kegagalan Kepala BNNP,"tekan Politisi F-Golkar itu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa mengatakan masih beredarnya narkoba di dalam Lapas karena lemahnya pengawasan keluar masuk orang atau tamu. Hal itu juga diungkapkan oleh Kepala BNN saat raker di Jakarta.

"Pasti ada peran aparat terhadap lalu lintas keluar masuknya orang oleh petugas lapas. Ada tuntutan wacana yang



Tim Komisi III DPR RI gelar pertemuan dengan Polda & BNNP Bali

dilempar Pak Buwas, BNN mau masuk melakukan pengawasan, pertanyaan saya BNNP sendiri sudah beres atau belum.

Karena peredaran narkoba sumbernya kan pasti dari luar, berarti peran BNNP dan Dir Narkoba yang tidak bisa mencegah barang dari luar masuk," ungkap Politisi F-Gerindra itu.

Kepala BNNP Bali, I Putu Gede Suastawa menyatakan, sebulan sekali pihaknya melakukan sweeping ke dalam Lapas Kerobokan, dan selalu menemukan barang bukti sabu-sabu, sound system, hp,

dan kelengkapan lainnya.

Ia mengakui, memang pengawasan di Lapas masih lemah, di luar pihaknya bekerja keras dengan Polda, dan di dalam menekan agar barang-barang tidak bisa masuk. Dari hasil pemeriksaan pengembangan kasus-kasus hampir 30 persen akhirnya bermuara juga ke lapas, ada juga beberapa yang dijadikan tersangka untuk diproses hukum.

"Inilah kerja keras yang harus kita lakukan secara bertahap, hasil penangkapan dari bulan Januari sampai Maret sangat besar. Di luar masih banyak beredar, dari data yang ada sebanyak 61.353 orang di Bali adalah penyalaguna narkoba," tutupnya. ■

(ikmp) Foto: Jaka/hr

BPOM Perlu Jelaskan Isu Permen Mengandung Narkoba

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait isu permen yang diduga mengandung narkoba.

Setjen DPR RI Selenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Eksekutif Satria Pratama

Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dituntut menuju pimpinan kelas dunia, dengan jiwa kepemimpinan berbasis kearifan lokal, Dalam rangka membangun hal itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen DPR RI mengadakan Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Eksekutif Satria Pratama di Wikasatrian, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, (10/03).

Diklat yang dibuka oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson Rajagukguk tersebut menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan program revolusi mental dan reformasi birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka dari itu, pelatihan ini adalah untuk mentransformasi *mindset* dan perilaku Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama menjadi lebih baik.

"Acara ini menjadi sangat penting bagi kita, karena kepemimpinan itu sesuatu hal yang senantiasa dinamis, karena itu tentu kita harus bisa mengembangkan unsur-unsur yang ada didalam kepemimpinan itu sendiri dan benar-benar dapat dimunculkan didalam kegiatan atau aktivitas kepemimpinan, terutama di Setjen dan BKD DPR RI," ujar Johnson.

Johnson menambahkan, manfaat



Kepala BKD Johnson Rajagukguk saat membuka Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Eksekutif Satria Pratama

diadakannya. "Diklat ini adalah agar kinerja pimpinan Setjen DPR RI dan BKD lebih produktif, akuntabel, profesional dan mampu menjaga diri dari perilaku yang sesuai dengan kode etik dan sumpah jabatan. Hal ini tentunya demi kepentingan bangsa dan

negara serta masyarakat khususnya dalam memberikan dukungan kepada DPR RI.

Disamping itu, masih kata Johnson, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk membangun sinergi dalam menciptakan performa tim di Setjen dan BKD yang saling memahami, berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Menurutnya, kepemimpinan merupakan salah satu unsur untuk menentukan keberhasilan,

"Ketika pemimpin kita berhasil maka tugas-tugas kita akan berhasil

dengan baik dan menjadi hal yang strategis dalam suatu organisasi. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat pada diri sendiri tetapi akan kita lihat nanti terhadap implementasi dari kepemimpinan untuk produk organisasi," ungkap Johnson. ■

“ Karena isu ini masih simpang siur di masyarakat, kami minta BPOM segera memberikan penjelasan serta jawaban tertulis kepada DPR RI agar kegelisahan masyarakat bisa teratasi,” ujarnya sebelum Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Rabu (15/03).

Jika isu ini benar, Erma berharap mekanisme pengawas BPOM di semua lini dapat ditingkatkan, dan segera berkerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), sebab ini menyangkut jumlah anak yang kemungkinan akan menjadi pecandu pada saatnya nanti.

"Jika isu permen yang mengandung narkoba ini benar, kita berharap peranan BPOM lebih memaksimalkan perannya, karena ini menyangkut jumlah generasi penerus bangsa. Ini harus segera ditangani karena jika benar akan menjadi malapetaka bagi Indonesia. Maka dari itu kita akan

menggelar Rapim untuk memanggil BPOM," tuturnya.

Mengenai jumlah tenaga kerja BPOM yang masih kurang dan keterbatasan wewenang, Erma berharap BPOM segera membuat Rancangan Undang-Undang (RUU), untuk memperkuat BPOM. "Memang jumlah SDM dan kewenangannya terbatas, makanya kita berharap BPOM segera membuat RUU agar bisa diprioritaskan periode sekarang ini," harapnya.

Politisi PPP itu juga menghimbau masyarakat khususnya orang tua dan guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anak. "Orang tua apalagi guru yang berada di lingkungan sekolah harus meningkatkan pengawasan agar, anak-anak ini dapat terjaga," pungkasnya. ■



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

Perlu Dibentuk Satuan Wilayah Produksi Pertanian

Pemerintah perlu segera menetapkan satuan wilayah produksi pertanian untuk membenahi sistem produksi dan permintaan pasar di Tanah Air. Selama ini belum ada penetapan suatu wilayah sebagai sentra komoditas pertanian tertentu. Ke depan ini menjadi kewajiban bagi pemerintah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam diskusi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/03), yang membincang kenaikan harga cabe di Tanah Air. Menurut politisi Partai Demokrat ini, penetapan satuan wilayah penting untuk memaksimalkan produksi pertanian sekaligus mengendalikan harga pasar. Misalnya, di Garut khusus memproduksi cabai atau Brebes jadi wilayah sentra produksi bawang.

"Dengan penetapan satuan wilayah ini akan memastikan *demand and supply* yang harus disiapkan pemerintah. Selama ini belum ada penetapan tersebut. Dan itu wajib ke depan," ucap Herman. Mengomentari kenaikan harga cabai yang sangat tinggi, Herman mengatakan, di saat musim hujan atau basah, harga cabai selalu meroket, karena produksi tidak maksimal. Acuan harga cabai memang timpang. Di tingkat petani rendah, di tingkat konsumen malah tinggi.

Ada aspek cuaca yang selalu memengaruhi harga komoditas cabai di pasaran. Di kabupaten tertentu, lanjut Herman, malah ada kebijakan agar PNS setempat wajib menanam cabai di *polybag*. Akibatnya, produksi akan melimpah dan harga di tingkat petani akan tergerus. Di sinilah pentingnya ada penetapan satuan wilayah sebagai sentra produksi cabai. Dalam kondisi seperti ini kartel dan bandar akan tumbuh subur.

Herman pun menyatakan, sudah lama pihaknya mengusulkan ada instrumen negara yang hadir di tengah masyarakat untuk komoditas tertentu, seperti bulog yang mengatur komoditas padi. Instrumen inilah yang kelak akan melawan kekuatan kartel, bandar, dan para cukong di pasaran. Dengan begitu tak ada lagi lonjakan harga pangan yang tak terkendali sekaligus mengatur harga



Pembicara pada Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI

agar petani tak selalu dirugikan.

Pembicara lainnya, Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra menyorot, peran bulog yang sempat tersingkir akibat liberalisasi perdagangan ketika IMF masuk ke Indonesia tahun 1998. Akibatnya, petani tak kuasa

bukan semata-mata karena fraktor cuaca yang mengakibatkan harga cabai di pasaran melonjak tajam. Pasokan ke masyarakat pun menurun. Struktur pasar kita masih dikuasai praktik oligopoly dan negara belum tampak hadir," pandang Eka. ■

menghadapi para bandar. "Ada kebijakan yang salah dalam menetapkan harga komoditas. Pemerintah mengontrol harga di hulu, tapi melepas harga di hilir," kata Anggota F-PG tersebut.

Ada problem, memang, dengan tata niaga cabai saat ini. Pasar cabai pun dialihkan dari pasar tradisional ke pasar industri yang harganya lumayan tinggi. Para pengusaha besar itu berani membeli mahal, sehingga distribusi cabai di pasar tradisional menyusut. "Jadi, ini

Politisi DPR RI Harapkan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berdemokrasi

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menekankan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjadi agen perubahan dalam berdemokrasi, khususnya dalam memilih pemimpin di tingkat daerah maupun pusat.

Demikian ditegaskannya di hadapan 200 Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Puangrimaggalatung atau yang lebih dikenal dengan STKIP Prima, Sengkang, Sulawesi Selatan di Gedung DPR RI,

Senayan, Jakarta, Senin (13/03).

"Saya mengajak para mahasiswa untuk membantu menyadarkan masyarakat bahwa demokrasi itu hanya tujuan antara, bukan tujuan akhir. Bahwa tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, mahasiswa sebagai *agen of*

(mh/sc) Foto: arteif/hr



BKSAP DPR RI Desak WTO Prioritaskan Negara Berkembang

BKSAP DPR RI mendesak PC WTO untuk lebih fleksibel dan pragmatis dengan mengutamakan kebutuhan negara berkembang untuk mengakselerasikan pembangunan di negara mereka.



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

“Walaupun memiliki kepentingan yang berbeda antara anggota WTO, kami mengharapkan anggota WTO dapat menunjukkan fleksibilitas dan pragmatis, serta mengutamakan kebutuhan negara berkembang untuk mengakselerasi pembangunan.” ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf. lebih lanjut, dia juga meminta komitmen seluruh negara-negara anggota terhadap keputusan MC-10 di Nairobi lalu.

Pada kesempatan tersebut, DPR RI menyambut baik diimplementasikannya *Trade Facilitation Agreement* (TFA) sejak 22 Februari 2017. Sehubungan

dengan hal tersebut, Ketua BKSAP menyampaikan, Perkembangan tersebut membuktikan bahwa walaupun sulit untuk

mencapai kesepakatan dalam forum multilateral, WTO mampu memberikan perubahan.

Dia menambahkan, soal *public stockholding* harus menjadi salah satu deliverables dalam MC-11 mendatang, sesuai mandat informal *meeting* di Oslo pada Oktober tahun lalu. "Isu pertanian merupakan bagian tak terpisahkan dari Bali *Package*. Jangan sampai isu ini dianggap sebagai *tradeoff* untuk negosiasi lain," ujarnya.

Delegasi DPR RI yang hadir dalam pertemuan *Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO* (SC PC WTO) ke-38 di Brussels, Belgia tanggal 9 Maret 2017 yaitu Ketua BKSAP Dr. Nurhayati Ali Assegaf dan Yoseph Umar Hadi. Anggota *Steering Committee* ini terdiri dari 30 perwakilan parlemen anggota *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dan Parlemen Eropa. ■

(si) Foto: andri/hr

change, harus bisa mengajarkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang betul-betul mengerti fungsinya, tidak memilih berdasarkan pemberiannya," tegas politisi dari F-PAN itu kepada mahasiswa/i STKIP Prima.

Selain menekankan konsep agen perubahan, Andi Yuliani juga menjelaskan pentingnya pembentukan moral dan integritas. Menurutnya, masih banyak suara masyarakat yang

dengan begitu mudahnya didapatkan dalam pelaksanaan kontes demokrasi atau pemilihan kepala daerah maupun pusat.

Beberapa kalangan masyarakat mudah terpengaruh karena pemberian dari para peserta pemilu sehingga mereka tidak memilih berdasarkan kapabilitas peserta.



Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

Selain itu, kurangnya sosialisasi tugas dan fungsi DPR RI dalam kampanye mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran DPR RI.

"Untuk itu, mahasiswa harus berperan serta di dalam mensosialisasikan beberapa perundang-undangan yang dibuat DPR RI,

dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi lembaga legislatif," tuturnya

Kepada mahasiswa yang hadir, ia menghimbau agar mereka menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Bahkan, dirinya berharap nantinya mereka mampu mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari pelaksana eksekutif maupun legislatif. Terlebih lagi, hasil proyeksi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh usia produktif.

"Kita harapkan nantinya mereka dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya sekedar lulus mencari pekerjaan tetapi nantinya mampu menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat," tandas Andi. ■

(amr,mp)/foto:jayadi/hr

DPR RI Desak Pemerintah Keluarkan Perpu untuk *Freeport*

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai solusi awal ditengah polemik PT. Freeport Indonesia (Freeport) terkait PP Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar Freeport memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

“ Jadi, persoalannya Pemerintah tidak bisa melaksanakan Undang-Undang (UU) Minerba itu sendiri. Sehingga mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2012. Karena itu UU itu harus direvisi dan jalan keluar yang paling cepat adalah mengeluarkan Perppu," tegas politisi Gerindra itu dalam forum legislasi "Implementasi UU Minerba, untuk Masa Depan Bangsa dan Negara" bersama Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/03).

Oleh karena itu kata Ramson, sekarang ini pemerintah harus mencari solusi agar tidak terjadi polemik terus-menerus. "Makanya kita

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba pasal 103 dan 170 dimana ada waktu sampai tahun 2014, tapi tidak dilaksanakan. Lalu mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2012, dan kini mengeluarkan PP yang sama Nomor 1 Tahun 2017 dengan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Dan, PT Freeport bersedia mengakhiri rezim kontrak karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun itu dengan mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Itu artinya kata Enny, UU Minerba itu tidak dijalankan selama ini. Sama halnya dengan sosialisasi 'Tax amnesty' melalui ancaman-



freeport itu memberi nilai ekonomi. Sehingga tidak harus menunggu dibangunnya smelter," jelasnya.

Padahal, pemerintah kalau mempunyai komitmen baik bisa membangun sendiri sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah untuk kemakmuran rakyat, maka harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan mengolah sendiri menurut Enny, maka pemerintah bisa memantau jumlah produksi dan kekayaan freeport selama ini. "Kalau selama ini tidak tahu berapa kekayaan freeport yang diproduksi. Karena itu pemerintah harus mempunyai komitmen sesuai dengan amanat UU Minerba. Kalau berhasil mengolah tambang emas freeport itu, maka akan menjadi basis industri," ungkapnya.

Dengan demikian pengolahan sumber daya alam (SDA) itu harus menjadi bagian dari infrastruktur yang terprogram karena akan berdampak ekonomi, sosial, dan politik untuk Indonesia ke depan. "Penerimaan negara akan meningkat, tak ada lagi celah (loopholes) untuk dimanipulasi oleh asing, dan mengetahui jumlah yang diproduksi. Karena itu dibutuhkan regulasi sebagai payung hukum untuk menutup celah manipulasi itu," pungkasnya. ■



Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian saat Diskusi Forum Legislasi

tidak lagi beretorika, tapi harus secepatnya ada solusi demi kepentingan negara, rakyat dan investor sendiri, agar saling menguntungkan dan investasi terus meningkat," ujarnya.

Sementara, Enny Sri Hartati mengatakan jika kita ingin dunia usaha konsisten maka pemerintah juga harus konsisten. Persoalannya selama ini pemerintah konsisten tidak? Seperti

ancaman. Padahal, jangankan diancam, pajak dengan insentif saja tidak jalan dengan maksimal.

Untuk polemik smelter itu menurut Enny, kalau juga belum dibangun tetap harus ada solusi. Sebab, sayang kalau potensi ekonominya tinggi, dan tidak diekspor, akibat tidak ada pengolahan di Indonesia, maka kita akan rugi. "Yang penting pengolahan tambang



Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan delegasi Lemhanas Emirat Arab

Lemhanas Emirat Arab Gali Informasi Peran Parlemen Indonesia

Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan delegasi Lemhanas Persatuan Emirat Arab (PEA) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/03). Diungkapkan Kepala BKD K. Johnson Rajagukguk, kedatangan delegasi PEA ini untuk mengetahui peran DPR RI dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

“ Kita menerima kunjungan Lemhanas Uni Emirat Arab, mereka ingin mendapatkan informasi terkait peran DPR RI dalam sistem pemerintahan kita dan sudah kita sampaikan fungsi DPR RI hingga hak-hak anggota DPR RI,” ujar Johnson.

Lebih lanjut, kepada delegasi, ia menjelaskan mengenai peranan DPR RI dalam mempertahankan nasionalisme. Mengingat, kemajemukan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Menurutnya, peran DPR RI dapat dilihat dari kebijakan politik maupun anggaran serta mengawasi kebijakan pemerintah.

“Harus menjadi perhatian parlemen, jangan sampai kebijakan pemerintah

bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar ideologi negara. Dengan dua dasar itu, maka semua lembaga negara harus merepresentasikan kebhinekaan atau keberagaman bangsa Indonesia.

“Di DPR RI, tercermin dengan adanya 10 fraksi pemenang pemilu. Kesepuluhnya merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia di 34 provinsi di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Disamping itu, para delegasi terlihat sangat antusias untuk membahas peran parlemen Indonesia dalam perang teluk di negara Timur Tengah. Terkait hal itu, Johnson mengatakan

hal tersebut merupakan ranah kewenangan dewan, namun ia tak menampik jika Indonesia bisa turut berkontribusi membantu penyelesaian konflik melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

“Kepentingan-kepentingan atau masalah yang ada di Timur Tengah, tentu diperjuangkan anggota Parlemen lewat OKI, itu sangat memungkinkan,” imbuhnya menanggapi pertanyaan para delegasi PEA yang dipimpin oleh Khalid Juma Abdulrahman Alqattan.

Persatuan Emirat Arab (PEA) atau United Arab Emirates beranggotakan tujuh negara federasi emirat, yakni Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain dan Fujairah. ■

(amy)/foto:kresno/hr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon bersama Ketua Parlemen Thailand Pornpetch Wichitcholchai melihat Pameran dan Bursa Keris Nasional, Rabu (15/3). Foto: Andri



Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora dipimpin Wakil Ketua Ferdiansyah terkait pengajuan kewarganegaraan Indonesia pemain sepakbola Ezra Walian, dan Glenn Walian Kamis (16/3). Foto: Kresno



Bidang Arsip dan Museum Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Setjen DPR RI menggelar FGD Permuseuman dengan tema "Registrasi, Database dan Dokumentasi Koleksi Museum" di Gedung Nusantara I, Kamis (16/3). Foto: Jaka